



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DISHUB

Kabupaten Purwakarta
JL.VETERAN NO.1 CISEUREUH PURWAKARTA

Email : dishub.pwk@gmail.com
Website : dishub.purwakartakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024.

Penyusunan rencana kerja perubahan ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaann Rencana Kerja Murni Tahun 2024, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program kegiatan masyarakat dan program pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 30 Oktober 2024
KEPALA DINAS PERUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM
NIP. 19720228 200312 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN	14
Memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan sampai Triwulan III, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan (Tabel Evaluasi Triwulan III)	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tab Matrik	25
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Darah, terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk pelaksanaan rencana pembangunan secara teknis dan konkrit. Oleh karena itu, Renja Perangkat Daerah harus disusun dengan seksama dan memperhatikan berbagai kaidah perencanaan pembangunan yang baik.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai stakeholders dan unsur pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk jangka waktu tertentu khususnya di daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan aturan yang secara spesifik membahas secara teknis mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Purwakarta, Renstra Dishub, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renja Propinsi Jawa Barat.

Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan

Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan publik sesuai tugas pokok fungsi Perangkat Daerah dan merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik. Tahapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta terdiri dari enam (6) tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri No 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen renja Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan pula dengan tegas pula bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja Perangkat Daerah khususnya dalam hal sasaran sebagai dasar dalam penilaian SAKIP Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 juga berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/ Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/Lembaga dalam hal ini, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan Renja Provinsi, dalam hal ini Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Dishubprov Jabar), tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, seperti halnya Renstra Dinas Perhubungan maupun RKPD Kabupaten Purwakarta. Namun Renja Kementerian Perhubungan dan Renja Dishubprov Jabar perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana berbagai program pada Renja Kementerian/Lembaga dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjut dalam APBD

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Sedangkan RKA Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, Renja merupakan salah

satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kabupaten Purwakarta.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I-5 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I-6 Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I - 7
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I-8;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun 2024-2026
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023

- tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Pendahuluan I – 9;

43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
45. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2024;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan melalui capaian target program dan kegiatan pembangunan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, landasan hukum pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN

Memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan sampai Triwulan III, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan (Tabel Evaluasi Triwulan III)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tab Matrik

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN DINAS
PERHUBUNGAN

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, dengan adanya evaluasi ini akan diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu sehingga akan dicapai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta juga harus dilaksanakan evaluasi. Karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada Januari 2024, oleh karena itu yang disajikan merupakan perkiraan realisasi tahun 2024 Triwulan III sebagaimana tersebut dalam T-C29 terlampir:

**Tabel 2.1 T-C.29
EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024**

Kode	Perangkat Daerah/Bidang /Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD Parsial 2 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan III			Selisih		Catatan Permasalahan
			Lokasi	Target	Pagu	Target	Pagu	%	Pagu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8/6)	10=(6-8)	11= (10/6)	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				48.231.357.684		29.872.389.264	61,94	18.358.968.420	38,06	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				39.740.048.844		25.747.453.095	64,79	13.992.595.749	35,21	
2 15 01 2 01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73.711.600		26.546.300	36,01	47.165.300	63,99	
2 15 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	PWK	3 Dok	21.695.700	2 Dok	7.473.400	34,45	14.222.300	65,55	
2 15 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PWK	1 Dok	10.364.800	-	3.530.800	34,07	6.834.000	65,93	
2 15 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PWK	1 Dok	9.603.100	-	2.769.100	28,84	6.834.000	71,16	
2 15 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PWK	1 Dok	9.732.100	-	-	0	-	100	
2 15 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PWK	1 Dok	9.541.900	-	-	0	-	100	

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	PWK	1 Laporan	7.956.000	1 Laporan	7.956.000	100	-	0	
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun	PWK	1 Laporan	4.818.000	1 Laporan	4.817.000	99,98	1.000	0,02	
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.605.427.201		7.791.434.802	73,47	5.405.531.902	26,53	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN	PWK	98 Org/Bln	10.577.908.301	98 Org/Bln	7.774.196.902	73,49	5.359.498.202	26,51	
2	15	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PWK	1 Dok	20.249.000	1 Dok	9.968.000	49,23	16.033.700	50,77	
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD tersedia	PWK	1 Laporan	7.269.900	1 Laporan	7.269.900	100	-	0	
2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				29.113.000		10.741.000	36,89	18.372.000	63,11	
2	15	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PWK	1 Dok	9.817.000	1 Dok	9.817.000	100	-	0	
2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	PWK	4 Laporan	9.572.000	-	-	0	9.572.000	100	
2	15	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PWK	1 Laporan	9.724.000	-	924.000	9,50	9.724.000	90,50	
2	15	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				15.680.000		-	0	15.680.000	100	
2	15	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan	PWK	1 Dok	15.680.000	-	-	0	15.680.000	100	
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				479.377.000		332.200.000	69,30	147.177.000	30,70	

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PWK	257 Paket	199.440.000	257 Paket	199.143.000	99,85	297.000	0,15	
2	15	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PWK	1 Dok	9.937.000	-	-	0	9.937.000	100	
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PWK	29 Org	270.000.000	29 Org	133.057.000	49,28	136.943.000	50,72	
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.716.035.049		779.032.137	45,40	9.37.002.912	54,60	
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	PWK	1 Paket	52.797.000	1 Paket	4.916.000	9,31	47.881.000	90,69	
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	PWK	1 Paket	155.014.000	1 Paket	112.440.000	72,54	42.574.000	27,46	
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	PWK	1 Paket	62.186.000	1 Paket	25.493.000	40,99	36.693.000	59,01	
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	PWK	1 Paket	900.000.000	1 Paket	456.100.257	50,68	443.899.743	49,32	
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan pengandaan	PWK	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.637.700	97,64	2.362.300	2,36	
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pwk	1 Dok	14.400.000	1 Dok	6.840.000	47,50	7.560.000	52,50	
2	15	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	PWK	1 Laporan	24.800.000	1 Laporan	24.200.000	97,58	600.000	2,42	
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Rapat-rapat koordinasi dan keluar	PWK	1 Laporan	166.838.049	1 Laporan	51.405.180	30,81	115.432.869	69,19	

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

						Kabupaten/Kota									
2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lapoaran Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	PWK	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	132.041.700	88,03	17.958.300	11,97
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				267.745.000		49.728.000	18,57	218.017.000	81,43
2	15	03	2	13		Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				267.745.000		49.728.000	18,57	218.017.000	81,43
2	15	03	2	13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	PWK	1 Unit	218.017.000	Unit	-	0	218.017.000	100
2	15	02	2	13	10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	PWK	1 Laporan	49.728.000	1 Laporan	49.728.000	100	-	0

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 Dinas Perhubungan menyusun Program dan Kegiatan untuk Parsial Rencana Kerja yang terdiri dari 3 Program dan 19 Kegiatan 60 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.879.534.447,- dengan rincian indikasi Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
 - g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
 - h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Pelayaran
 - a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Rencana Program dan Kegiatan dengan anggaran pada Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
MATRIKS RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

KODE						PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD Parsial (sesuai DPA)			PERUBAHAN TAHUN 2024		SELISIH		PERANGKAT DAERAH	
								Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(6-8)	10	11	
2	15					DINAS PERHUBUNGAN					48.231.357.684		48.879.534.447	648.176.763	1,34%	
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.740.048.844		39.638.225.607	-101.823.237	-0,26%	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					73.711.600		73.711.600	0	0%	
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	PWK	100%	21.695.700	100%	21.695.700	0	0%		
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PWK	100%	10.364.800	100%	10.364.800	0	0%		
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PWK	100%	9.603.100	100%	9.603.100	0	0%		
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PWK	100%	9.732.100	100%	9.732.100	0	0%		
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PWK	100%	9.514.900	100%	9.514.900	0	0%		
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	100%	7.956.000	100%	7.956.000	0	0%		

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

2	15	01	2	01	07	Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	100%	4.818.000	100%	4.818.000	0	0%
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.605.427.201		10.987.875.201	382.448.000	3,61%
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah Gaji dan tunjangan ASN	PWK	100%	10.577.908.301	100%	10.965.908.301	388.000.000	3,67%
2	15	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PWK	100%	20.249.000	100%	14.697.000	-5.552.000	-27,42%
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tersedia	PWK	100%	7.269.900	100%	7.269.900	0	0%
2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				29.113.000		29.113.000	0	0%
2	15	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PWK	100%	9.817.000	100%	9.817.000	0	0%
2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PWK	100%	9.572.000	100%	9.572.000	0	0%
2	15	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PWK	100%	9.724.000	100%	9.724.000	0	0%
2	15	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				15.680.000		0	-15.680.000	-100%
2	15	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan	PWK	100%	15.680.000	100%	0	-15.680.000	-100%
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				479.377.000		495.493.000	16.116.000	3,36%
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PWK	100%	199.440.000	100%	199.440.000	0	0%
2	15	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PWK	100%	9.937.000	100%	9.937.000	0	0%
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	PWK	100%	270.000.000	100%	286.116.000	16.116.000	5,97%

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

						Pendidikan dan Pelatihan								
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.716.035.049		1.642.205.733	-73.829.316	-4,30%
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	PWK	100%	52.797.000	100%	21.197.000	-31.600.000	-59,85%
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	PWK	100%	155.014.000	100%	155.014.000	0	0%
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	PWK	100%	62.186.000	100%	44.150.000	-18.036.000	-29%
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	PWK	100%	900.000.000	100%	850.806.684	-49.193.316	-5,47 %
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan pengandaan	PWK	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	0%
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PWK	100%	14.400.000	100%	14.400.000	0	0%
2	15	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	PWK	100%	24.800.000	100%	24.800.000	0	0%
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PWK	100%	166.838.049	100%	166.838.049	0	0%
2	15	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PWK	100%	0	100%	25.000.000	25.000.000	100%
2	15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah menu/fitur sistem	PWK	100%	240.000.000	100%	240.000.000	0	0%
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah				5.321.686.093		5.321.271.409	0	0%
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	PWK	100%	170.995.409	100%	170.995.409	0	0%
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	PWK	100%	5.015.359.684	100%	5.014.945.000	0	0%
2	15	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	PWK	100%	135.331.000	100%	135.331.000	0	0%
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.375.291.101		19.905.027.864	-470.263.237	-2,31%

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat tersedia	PWK	100%	2.500.000	100%	2.500.000	0	0%
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PWK	100%	15.220.802.773	100%	14.730.979.536	-489.823.237	-3,22%
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Tenaga Harian Lepas, PTT, Penjaga Malam, Pembantu Penguji dan Premi Asuransi	PWK	100%	5.151.988.328	100%	5.171.548.328	19.560.000	0,38%
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.123.727.800		1.183.527.800	59.800.000	5,32%
2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	PWK	100%	99.700.000	100%	84.500.000	-15.200.000	-15,25%
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	PWK	100%	234.500.000	100%	309.500.000	0	0%
2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	PWK	100%	135.101.000	100%	135.101.000	0	0%
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PWK	100%	337.865.150	100%	337.865.150	0	0%
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PWK	100%	241.451.650	100%	241.451.650	0	0%
2	15	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	PWK	100%	75.110.000	100%	75.110.000	0	0%
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)				8.223.563.840		9.173.563.840	950.000.000	11,55 %
2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				468.000.000		468.000.000	0	0 %
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan	Jumlah Dokumen	PWK	100%	468.000.000	100%	468.000.000	0	0 %

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	PWK	100%	553.816.800	100%	527.250.800	-26.566.000	-4,80%
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PWK	100%	225.000.000	100%	251.566.000	26.566.000	11,81%
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tersedia	PWK	100%	55.000.000	100%	55.000.000	0	0%
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terpelihara	PWK	100%	107.500.000	100%	107.500.000	0	0%
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.965.000.000		2.365.000.000	400.000.000	20,36%
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	PWK	100%	1.790.000.000	100%	2.190.000.000	400.000.000	22,35%
2	15	02	2	06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PWK	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	0%
2	15	02	2	06	17	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	PWK	100%	75.000.000	100%	75.000.000	0	0%
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				276.269.500		276.269.500	0	0%
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	PWK	100%	161.869.500	100%	161.869.500	0	0%

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2024

2	15	02	2	07	06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	PWK	100%	114.400.000	100%	114.400.000	0	0%
2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				412.500.000		412.500.000	0	0%
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	PWK	100%	75.000.000	100%	75.000.000	0	0%
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	PWK	100%	237.500.000	100%	237.500.000	0	0%
2	15	02	2	08	07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PWK	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	0%
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000	0	0%
2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	PWK	100%	150.000.000	100%	150.000.000	0	0%
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN				267.745.000		67.745.000	-200.000.000	-74,70%
2	15	03	2	13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				267.745.000		67.745.000	-200.000.000	-74,70%
2	15	03	2	13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	PWK	100%	218.017.000	100%	18.017.000	-200.000.000	-91,74%
2	15	03	2	13	10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	PWK	100%	49.728.000	100%	49.728.000	0	0%

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan Renja Murni Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat di Dinas Perhubungan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen ini.

Purwakarta, 30 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA

R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM
NIP. 19720228 200312 1 003